



## Organisasi Perempuan sebagai Agen Sosialisasi Politik di Kabupaten Kudus (Studi Kasus: Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah)

Nevy Rusmarina Dewi

IAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

nevyrusmarina@iainkudus.ac.id

### **Abstract**

*The interest of women in Kudus in joining women's organizations is quite high, among these organizations are Fatayat and Nasyyiatul Aisyiah (NA). Although participation in organizations is quite high, their participation in political life is still not optimal. This can be seen by the absence of female legislators and the absence of female regents in Kudus. This study discusses the role of women's organizations in Kudus, especially Fatayat and Nasyyiatul Aisyiyah in carrying out political socialization for women in Kudus. The aim of the research is to find out how political socialization is carried out by the two women's organizations in Kudus, namely Fatayat and Nasyyiatul Aisyiyah. The research method used is qualitative-descriptive. The results of the research show that the political socialization carried out by Fatayat and Nasyyiatul Aisyiyah has not had the maximum impact on women's active participation in political life. Many women participate only when exercising their right to vote in elections. Their participation is influenced by society's negative stigma towards women's political roles and the absence of women's leadership in Kudus as a motivation for women to be active in political life.*

*Keywords: political socialization, fatayat, Nasyyiatul Aisyiyah, Kudus*

## **Abstract**

Animo perempuan di Kudus dalam mengikuti organisasi perempuan cukup tinggi, diantara organisasi tersebut adalah Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiah (NA). Walaupun keikutsertaan dalam organisasi cukup tinggi, namun partisipasinya dalam kehidupan politik masih belum maksimal. Hal ini terlihat dengan belum adanya anggota legislatif perempuan serta belum adanya bupati perempuan di Kudus. Penelitian ini membahas bagaimana peran organisasi perempuan di Kudus khususnya Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiah dalam melakukan sosialisasi politik bagi perempuan di Kudus. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan oleh kedua organisasi perempuan di Kudus yaitu Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiah belum memiliki dampak yang maksimal bagi partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan politik. Banyak perempuan yang berpartisipasi hanya saat menggunakan hak pilih saat pemilu. Partisipasi mereka dipengaruhi oleh stigma negatif masyarakat terhadap peran politik perempuan serta belum adanya kepemimpinan perempuan di Kudus sebagai motivasi perempuan aktif dalam kehidupan politik.

Kata kunci: sosialisasi politik, fatayat, Nasyyiatul Aisyiah, kudus

## **Pendahuluan**

Partisipasi perempuan dalam bidang politik era reformasi lebih berkembang dibanding pada masa sebelumnya. Keterwakilan minimal 30% dalam legislatif memacu perempuan untuk lebih bergerak secara aktif pada bidang ini (Kiftiyah, 2019). Keterwakilan perempuan melalui UU No.2 tahun 2011 tentang pengaturan keterlibatan perempuan dalam partai politik. UU ini mengatur mengenai keharusan kepengurusan partai politik ada keikutsertaan dari perempuan. Selain itu juga pada UU No.8 tahun 2012 mengenai keterwakilanperempuan yang mendapatkan kuota 30% di parlemen pada saat Pilihan legislatif anggota DPR, DPD dan MPR.

Sejalan dengan keaktifan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, khususnya politik hal ini tidak lepas dari peranan organisasi perempuan yang ada di masyarakat sebagai penggerak perempuan. Nasyyiatul Aisyiah (NA) di Muhammadiyah dan Fathayat di Nahdhlatul Ulama memiliki peran yang cukup signifikan sebagai pendorong perempuan untuk bergerak lebih aktif di Indonesia. Kedua organisasi tersebut eksis di masyarakat dan semakin mengibarkan peranannya dalam pembinaan anggotanya. Keduanya juga termasuk

organisasi perempuan yang memiliki basis massa yang cukup besar, satunya mewakili dari Nahdhlatul Ulama dan satunya lagi dari Muhammadiyah dimana masing-masing organisasi berusaha untuk meningkatkan peranan kaum perempuan untuk lebih maju.

Gerakan aktif organisasi perempuan tersebut tidak hanya menjadi geliat di wilayah pusat, namun juga terjadi di daerah-daerah, termasuk aktifnya peranan perempuan di Kota Kudus. NA dan Fatayat di Kudus memiliki gerakan yang masif dalam mendorong perempuan aktif di berbagai bidang termasuk dalam bidang politik. Peranan kaum perempuan dalam politik tidak jauh dari usaha organisasi perempuan khususnya di Kota Kudus untuk membimbing, memberdayakan serta menggerakkan kaum perempuan yang tadinya hanya pada urusan domestik namun dapat maju ke ruang publik dan merambah ke berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan politik.

Fathayat NU merupakan organisasi perempuan di bawah Nahdhlatul Ulama yang beranggotakan perempuan yang rata-rata umurnya 20-45 tahun atau sudah menikah. Pada rentang umur tersebut merupakan usia perempuan yang produktif. Fatayat NU memiliki kegiatan yang arahnya menggerakkan perempuan ke arah produktivitas. Organisasi ini pada awalnya hanya melakukan pemberdayaan kaum perempuan agar lebih berdaya, namun seiring perjalanan waktu, organisasi ini mulai bergerak menyesuaikan modernisasi dan orientasinya mulai terukur secara profesional dalam mendidik perempuan dari kultur santri untuk dapat membuka diri dan pikiran dengan pilihan-pilihan yang dikehendaknya (fatayatnu.or.id, n.d.). Kaum santri perempuan biasanya melekat padanya ajaran – ajaran agama yang mengkerdikan perempuan, namun dalam Fatayat NU mereka diajak mengembangkan diri sehingga mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan perempuan baik dalam konsep seksualitas maupun politik perempuan.

NA merupakan organisasi perempuan yang berada di bawah Muhammadiyah yang mewadahi perempuan usia produktif sesuai dengan visi dan misinya. Visinya yaitu membentuk putri Islam yang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama demi terwujudnya masyarakat islami sedangkan misinya untuk melakukan dakwah bagi kaum perempuan dalam rangka pembinaan menuju akhlak amar ma;ruf nahi munkar, melakukan pemberdayaan perempuan dalam rangka menjunjung harkat dan kemanusiaan, serta

meningkatkan peran NA dalam penyelenggaraan amal usaha serta penyempurna perjuangan Muhammadiyah (nasyiah.or.id, n.d.). Beberapa program kerja dilakukan dalam NA untuk mewujudkan visinya antara lain melalui kegiatan parenting, melakukan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi sosial media, memberikan pelatihan tentang TOT kewirausahaan, peningkatan pengelolaan organisasi dengan menyelenggarakan workshop manajemen organisasi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan diri dan reproduksi melalui program pashmina, serta pelaksanaan program NA tanggap bencana sebagai sarana untuk meningkatkan jiwa social yang berguna bagi kemanusiaan.

Banyaknya peran organisasi perempuan khususnya Fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah dalam menggerakkan perempuan untuk berpartisipasi aktif tidak hanya dalam membina umat namun juga merambah pada politik membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran kedua organisasi perempuan tersebut dalam melakukan sosialisasi politik. Akhirnya muncul penelitian dengan judul “Organisasi Perempuan sebagai Agen Sosialisasi Politik di Kabupaten Kudus (Studi Kasus: Fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah)”.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *Pengertian Sosialisasi Politik*

Sosialisasi politik menjadi salah satu komponen penting dalam system politik karena di dalamnya terkandung interaksi social masyarakat untuk memperkenalkan nilai-nilai social dan politik sehingga dapat mempengaruhi pola perilaku seseorang dalam aktivitas politik. Dampak yang paling besar ditimbulkan akibat proses sosialisasi politik adalah munculnya tindakan, respon, maupun reaksi seseorang setelah mendapatkan informasi politik, jadi tidak hanya cukup menerima namun juga ada hasil respon atau feedback dari individu. Inti dari sosialisasi politik adalah untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada objek sosialisasi.

Menurut Syarbaini sosialisasi politik sebagai proses pembentukan sikap individu dalam masyarakat terhadap cara pandangnya serta dan orientasi politik (Syarbaini & dkk, 2014). Proses sosialisasi politik berlangsung seumur hidup baik melalui saluran formal seperti di sekolah maupun secara informal melalui kontak-kontak secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga atau teman bergaul. Hasil yang dapat diperoleh melalui proses ini perubahan sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat..

Menurut, Sutaryo, sosialisasi politik merupakan proses mendapatkan kebudayaan dan internalisasi individu dalam membimbing orang tersebut dalam harapan-harapan terhadap kelompoknya mengenai norma social (Sutaryo, 2005). Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Proses sosialisasi merupakan proses belajar dimana manusia tidak akan pernah merasa puas untuk selalu belajar untuk banyak hal yang belum diketahui. Proses belajar ini dilakukan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan social yang berasal dari norma-norma yang telah dipelajarinya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa obyek dari sosialisasi adalah masyarakat.

Menurut Ramlan Surbakti, pengertian dari Sosialisasi politik adalah metode dalam usaha penyampaian pesan politik yang terdiri dari proses pendidikan politik serta indoktrinasi politik (Surbakti, 2010). Dalam proses pendidikan politik, memiliki tujuan utama membangun sikap masyarakat yang aktif dengan wujud berpartisipasi dalam system politik di Negara tersebut melalui aktivitas politik (Damsar, 2010) . Sedangkan menurut Gabriel Almond sosialisasi politik adalah sebagai proses pembentukan pada budaya politik dalam masyarakat , yang kemudian dipelihara serta akan mengubah pola aktivitas politik melalui pengenalan nilai-nilai (Sulaeman, 2010). Contohnya mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika yang sedari kecil telah dikenal dan ditanamkan sejak kecil melalui penanaman nilai-nilai pancasila di dunia pendidikan, dimana ini merupakan bagian dari proses sosialisasi politik di masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pengenalan

sedini mungkin dalam nilai-nilai politik menjadi orientasi politik dalam peranan di masyarakat yang bersifat stabil dan berkesinambungan dalam system politik.

Kenneth P. Langton melihat sosialisasi politik sebagai usaha untuk menstransmisikan pengetahuan dan pengalaman budaya politik yang ada secara berjenjang dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui transfer nilai, keyakinan, sikap, khususnya perilaku politik yang ada dan berkembang (Sulaeman, 2010) . Melalui aktivitas inilah terjadinya proses pembentukan pengetahuan serta pemahaman dan budaya yang ingin dilestarikan ataupun budaya mana yang ingin diubah. Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi politik memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat, yaitu (Susanto, 1992):

1. Pertama, untuk menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi dengan memberikan dasar atau fondasi pengetahuan dan pemahaman politik. Dengan demikian akan tercipta tingkat partisipasi yang tinggi di masyarakat.
2. Kedua, regenerasi masyarakat dalam nilai social. Nilai- nilai social dan politik harus ditransmisikan pada generasi selanjutnya dengan tetap menyaring hal yang baik saja, serta kemudian dipadu padankan dengan nilai-nilai yang ada pada saat tersebut sehingga bias stabil dan seimbang.

### *Jenis-Jenis Sosialisasi Politik*

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Susanto membagi jenis sosialisasi menjadi dua, yaitu (Susanto, 1992):

1. Sosialisasi primer, sosialisasi primer identic dengan proses yang terjadi dalam pembentukan karakter individu di dalam keluarga. Hal ini dikarenakan sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Proses ini berlangsung di masa kanak-kanak dan dalam lingkungan keluarga.
2. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer, biasanya dilakukan dengan cara memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu

dalam masyarakat. Informasi yang didapat dari interaksi di masyarakat bias melalui kontak langsung politik ataupun dengan teman sejawat yang biasanya memiliki ikatan kuat sehingga memudahkan untuk melakukan suatu arahan aktivitas politik.

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Syahril Syarbaini, terbagi menjadi dua, yaitu (Syarbaini & dkk, 2014):

1. Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang sumber informasinya berada di bawah lembaga pemerintah. Dengan demikian sosialisasi politik dilakukan lembaga yang terkait dengan fungsi mereka melakukan sosialisasi politik, misal: KPU, Bawaslu, Kesbangpol, Kemendagri melalui forum formal seperti seminar, diskusi publik, maupun even lainnya.
2. Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. Pada jenis ini bias dilakukan oleh agen-agen non formal misalnya: keluarga, jaringan pertemanan, maupun melalui media massa

### *Agen – Agen Sosialisasi politik*

Agen-agen politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan sosialisasi politik, karena mereka adalah actor yang akan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai dan norma terkait aspek politik sehingga masyarakat dapat berperilaku berdasarkan informasi yang telah didapatkan melalui sosialisasi politik oleh agen-agen politik (Wibowo & Hasan, 2017). Berikut adalah agen-agen sosialisasi politik yang ada dalam masyarakat, sebagai berikut (Dagupta, 2011):

#### 1. Keluarga

Keluarga merupakan orang yang terdekat sehingga biasanya sebagai agen sosialisasi pertama, karena antar anggota keluarga telah berinteraksi sejak kecil dalam proses pembentukan kepribadian sehingga mengetahui karakter satu dengan yang lain. Hal ini mempermudah untuk memberikan pengaruh melalui sosialisasi politik, bagaimana keluarga membentuk perilaku politik anggota keluarga lainnya, dimana perilaku politik ini bisa ditanamkan dan dibentuk sejak dini melalui contoh-contoh maupun keteladanan dari anggota keluarga lainnya khususnya orang tua yang lebih dewasa dan

dapat menjadi suri tauladan. Sosialisasi melalui keluarga ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penentuan sikap individu dalam rangka berinteraksi dengan dunia politik serta melakukan respon terhadap aktivitas politik, seperti perilaku merespon kondisi politik, pola kepemimpinan yang telah ditanamkan dalam keluarga sehingga ketika berinteraksi dengan aktivitas politik di masyarakat mereka telah terbentuk dengan baik.

## 2. Sekolah

Setelah seseorang mendapatkan pemahaman politik dari keluarga, lingkungan selanjutnya yang memiliki kontribusi sangat besar bagi pembentukan karakter dan perilaku politik adalah sekolah. Mulai dari kurikulum yang diterapkan di sekolah tauladan kepemimpinan yang dibangun oleh guru dan diterapkan kepada siswa menjadi pengaruh besar dalam membentuk sikap serta cara pandang siswa dalam merespon kondisi masyarakat khususnya yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan yang dibrikan oleh guru di sekolah beragam dan dari berbagai macam perspektif ilmu sehingga menambah wawasan siswa serta cara pandang mereka dalam merespon situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Banyak pemimpin handal dan mumpuni karena mendapat gemblengan selama di sekolah yang membangun karakter dan kepribadian mereka sehingga mampu menjadi pemimpin di masa mendatang.

## 3. Kelompok Pergaulan

Kelompok pergaulan merupakan agen yang secara informal memotivasi seseorang untuk dapat mengarahkan seseorang berperilaku politik sesuai arahan mereka. Hal ini karena kelompok pergaulan memiliki ikatan erat dengan individu sehingga lebih fleksibel untuk memberi arahan karena mereka biasanya memiliki kesamaan pandangan dalam banyak hal. Interaksi di dalamnya memudahkan menransfer informasi sehingga ajakan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas politik mudah untuk dapat diterima oleh anggota lain. Dalam kelompok ini pandangan-pandangan baru lebih mudah diadaptasi antara satu orang dengan lainnya karena



biasanya teman sebaya dijadikan rujukan dalam mengembangkan sikap maupun perilaku termasuk dalam bidang politik (Damsar, 2010).

#### 4. Media Massa

Media massa pada saat ini menjadi bagian penting dalam proses sosialisasi politik karena berfungsi sebagai media informasi dari kebijakan-kebijakan politik serta respon politik baik dari pemerintah maupun feedback dari masyarakat. Media massa semakin kesini semakin canggih dan semakin beragam, menyediakan banyak saluran dan aplikasi sebagai sarana jembatan komunikasi bagi informasi politik. Media yang secara umum digunakan baik media cetak maupun media elektronik memiliki peranan sebagai penyampai informasi, terkadang mereka berperan pula untuk membentuk opini publik terhadap kebijakan-kebijakan politik maupun informasi-informasi politik. Informasi dengan mudah didapat melalui televisi, internet dan sangat mudah diakses melalui handphone. Media menyediakan berbagai bentuk informasi dan pendidikan politik yang intens diberikan kepada masyarakat. Seperti contohnya penyiaran berita mengenai aktivitas politik seperti diskusi politik dan berita situasi negara merupakan salah satu bentuk dari peranan media massa dalam menjadi agen sosialisasi. Khususnya media social, Sosialisasi politik yang dilakukan melalui media sosial ternyata mampu mendorong partisipasi aktif kaum muda (Octafitria, 2016). Media sosial tidak hanya memberi informasi, namun dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengambil suatu sikap politik yang bentuknya beragam.

#### 5. Kontak-Kontak Politik Langsung

Kontak politik secara langsung biasanya adalah aktor-aktor politik ataupun komunikator politik yang mereka menjadi bagian dari sistem politik dan kebijakan pemerintah. Segala kegiatan yang berhubungan dengan kontak politik secara langsung akan menyebabkan seseorang mengalami proses sosialisasi politik. Interaksi dengan kontak politik secara langsung akan sangat mempengaruhi pola pemikiran serta cara pandang seseorang mengenai perilaku politiknya yang bisa sama-sama memiliki

dampak negatif maupun positif disesuaikan dengan peristiwa atau informasi yang mereka dapatkan dari kontak politik langsung.

## 6. Pemerintah

Pemerintah adalah agen formal dalam sosialisasi politik, baik terkait kebijakan pemerintahan maupun terkait dengan pemilihan ataupun kebijakan politik. Beberapa lembaga di bawah pemerintah seperti Kesbangpol di tiap kabupaten/kota yang memiliki tugas sosialisasi politik serta urusan kebangsaan lainnya. Selain itu ada KPU dan Bawaslu yang menjadi lembaga yang melekat dengan fungsi penyelenggara pemilu serta pengawasannya. Saluran ini bisa berasal dari seluruh jajaran pemerintahan baik pusat sampai di daerah bahkan di tingkat desa sebagai fungsi sosialisasi terhadap kebijakan politik pemerintah.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, di antaranya adalah (Susanto, 1992):

1. Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran.
2. Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
3. Siapa yang mensosialisasikan, institusi, massa-media, individu dan kelompok

Michael Rush dan Phillip Althoff menilai keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh unsur-unsur seperti berikut (Rush & Althoff, 2002):

1. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Komunitas tersebut paling dekat dengan individu sehingga dapat mudah untuk memasukkan informasi pada individu dan kemudian mengarahkan pandangan mereka.
2. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.

4. Pola sosialisasi politik , sosialisasi politik membutuhkan proses yang berkesinambungan sehingga informasi dapat dicerna dengan baik dan dipahami oleh individu. Agen sosialisasi politik harus bisa memberikan pendampingan yang intensif agar hasilnya baik.

### *Bentuk Sosialisasi Fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah*

#### a. Bentuk sosialisasi Fatayat

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Fatayat biasanya disisipkan dengan beberapa kegiatan umum Fatayat lainnya seperti pada acara pengkaderan rutin Fatayat, pertemuan rutin, ataupun acara seminar yang dilakukan oleh Fatayat. Bentuk sosialisasi politik berupa pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilakukan di Fatayat Kudus berupa penjelasan mengenai hak-hak perempuan dalam politik, kesadaran dalam partisipasi politik, keikutsertaan dalam kehidupan politik. Selain itu juga memberikan materi Materi kepemimpinan dan organisasi, kesetaraan gender serta ke-aswaja-an. Fatayat juga terbuka terhadap kerjasama dengan organisasi, lembaga atau partai politik manapun yang ingin berkolaborasi dengan Fatayat.

Fatayat melakukan kolaborasi dengan lembaga lain dalam sosialisasi politik. Kerjasama dengan Bawaslu Kudus yang melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif masyarakat. Beberapa partai politik juga melakukan kolaborasi seperti Partai Golkar, dan Partai PKB contohnya Fatayat mendatangkan anggota dewan dari PKB Pak Muhasiron, dari Golkar Pak Mawahid melalui kegiatan yang disisipkan dalam berbagai pertemuan. Sedangkan kegiatan sosialisasi secara rutin sehari-hari disisipkan di kegiatan seperti parenting, LKD, ataupun kegiatan lain. Seperti materi Wawasan kebangsaan, bela Negara secara umum, nanti dikemas dengan acara seminar kemudian mengarah ke sosialisasi politik.ada yang kemudian dikemas dengan acara rutin lainnya. Soialisasi politik dilakukan secara berjenjang yaitu mulai dari Ranting, anak cabang, dan cabang yang rutin melalui kegiatan Latihan Kader Dasar (LKD) secara rutin.

b. Bentuk sosialisasi politik Nasyyiatul Aisyiyah (NA)

Sosialisasi di Nasyyiatul Aisyiyah juga memiliki pola yang sama dengan sosialisasi politik yang dilakukan oleh Fatayat. Nasyyiatul Aisyiyah juga menyelipkan kegiatan sosialisasi politiknya di acara-acara kegiatan rutin Nasyyiatul Aisyiyah. Materi-materi pendidikan politik yang dilakukan seperti kesadaran gender, prstisipasi politik, wawasan kebangsaan maupun kepemimpinan. Nasyyiatul Aisyiyah juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti Kesbangpol yang melakukan sosialisasi politik melalui wawasan kebangsaan. Nasyyiatul Aisyiyah juga kerjasama dengan PAN khususnya sebelum Pemilu untuk sosialisasi pemilu. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya diselipkan dalam kegiatan rutin di Nasyyiatul Aisyiyah baik itu dalam acara seminar, maupun acara rutin lainnya.

Nama organisasi	Jumlah kecamatan/cabang aktif	Jumlah desa/ranting aktif	Jumlah anggota aktif
Fatayat	9	112	4699
NA	6	33	825

Tabel perbandingan jumlah anggota aktif Fatayat dan NA di Kudus (2021)

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah menggunakan basis data kecamatan dengan patokan jumlah 9 kecamatan yang ada di Kudus. Banyak diantara organisasi baik umum maupun organisasi perempuan yang menggunakan basis kecamatan sebagai basis cabang dalam kepengurusan wilayah. Organisasi Fatayat memiliki jumlah cabang aktif sejumlah 9 cabang sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kudus, sedangkan Nasyyiatul Aisyiyah hanya memiliki 6 cabang aktif. Jumlah desa atau ranting aktif pada Fatayat sejumlah 112 ranting, jumlah ini lebih banyak dibandingkan jumlah ranting milik Nasyyiatul Aisyiyah. Jumlah anggota aktif Nasyyiatul Aisyiyah sejumlah 825 anggota sedangkan Fatayat jumlahnya lebih besar yaitu 4.699 anggota. Data ini bisa sellu berubah sesuai dengan perkembangan pergerakan organisasi yang mulai menggeliat pasca pandemic covid-19 di Indonesia.

## *Stigma Masyarakat terhadap Peran Politik Perempuan*

Jumlah perempuan di Kudus lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki, hal ini dibuktikan dengan data BPS (2021) sebanyak 427.123 perempuan sedangkan jumlah penduduk laki-laki 425.320 penduduk. Dengan jumlah perempuan yang lebih banyak maka suara dan keterlibatan perempuan masih sangat diperlukan dalam kontestasi politik. Adanya UU tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislative. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik lebih disebabkan adanya keragu-raguan dari perempuan terjun ke dunia politik. Sampai saat ini di Kudus belum d sosok anggota legislative di DPRD Kudus, pencalonan kandidat perempuan dalam pilkada 2018 pun masih belum bisa menghantarkan tampuk pimpinan daerah kepada pemimpin perempuan. Selain itu, ada sebagian perempuan yang berpendapat bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik. Hal ini menjadikan perempuan tidak memiliki ketertarikan dengan dunia politik bahkan di tingkat terbawah, yaitu tingkat desa. Oleh karena itu organisasi perempuan memiliki tugas untuk mengkampanyekan hubungan kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam dunia politik (Yuliani, 2016).

## *Ketidaan Sosok Pemimpin Wanita*

Faktor lain juga belum ada contoh sosok pemimpin perempuan yang memimpin di Kudus. Ketiadaan teladan perempuan sebagai pemimpin mempengaruhi pola pemikiran dari para perempuan untuk berkontribusi lebih dalam kehidupan politik di masyarakat. Jumlah perempuan di Kudus yang cukup banyak, seharusnya mampu untuk meloloskan seorang kandidat perempuan melalui dominasi suaranya. Sayangnya, jumlah keanggotaan Fatayat yang memiliki jumlah cukup besar belum bisa menjadi pendorong munculnya pemimpin perempuan. Selama ini anggota Fatayat tidak mendapat kekangan dari organisasi untuk berafiliasi ke partai politik manapun atau berafiliasi ke kandidat manapun. Hal ini sangat disayangkan, karena Fatayat sebagai salah satu organisasi perempuan yang kuat belum mampu melakukan gebrakan dengan mendorong kadernya yang mumpuni untuk maju di kontestasi politik dengan dukungan dari seluruh kader Fatayat yang tersebar

di seluruh wilayah kudus. Pemberdayaan perempuan oleh organisasi perempuan diperlukan untuk melahirkan sosok politisi perempuan yang tangguh dan kuat tanpa harus meninggalkan tugas domestic dalam rumah tangga (Yuliani, 2016).

### *Diskusi*

Michael Rush dan Phillip Althoff menilai keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh unsur-unsur seperti berikut (Rush & Althoff, 2002): pertama, Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Komunitas tersebut paling dekat dengan individu sehingga dapat mudah untuk memasukkan informasi pada individu dan kemudian mengarahkan pandangan mereka. Dalam kasus sosialisasi politik di kaum perempuan di Kudus, agen sosialisasi yang mewadahi perempuan dan memiliki peran untuk sosialisasi politik adalah organisasi perempuan, baik Fatayat maupun Nasyyiatul Aisyiyah. Fatayat maupun Nasyyiatul Aisyiyah. Namun sayangnya kedua organisasi tersebut belum secara maksimal melakukan sosialisasi politik karena berbagai macam hambatan. Background anggota masing-masing juga mempengaruhi tingkat penerimaan.

Kedua, Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat. Hal-hal ini menjadi focus dari Fatayat dan Nasyyiatul Aisyiyah untuk melakukan sosialisasi politik. Bentuk sosialisasi politik berupa pendidikan politik karena kedua organisasi ini terbuka untuk kerjasama dengan lembaga secara umum tidak harus kekhususan hanya berafiliasi dengan satu lembaga saja. Pendidikan politik yang dilakukan di Fatayat Kudus maupun Nasyyiatul Aisyiyah hamper sama, yaitu berupa penjelasan mengenai hak-hak perempuan dalam politik, kesadaran dalam partisipasi politik, keikutsertaan dalam kehidupan politik. Selain itu juga memberikan materi Materi kepemimpinan dan organisasi, kesetaraan gender.

Ketiga, Pola sosialisasi politik, sosialisasi politik membutuhkan proses yang berkesinambungan sehingga informasi dapat dicerna dengan baik dan dipahami oleh individu. Agen sosialisasi politik harus bisa memberikan pendampingan yang intensif agar hasilnya baik. Baik Fatayat Penerimaan kader tentang politik, ada yang welcome namun

ada yang biasa. Hal ini terkait pendidikan masing-masing background kader dari kedua organisasi yang sebagian besar sebagai pendidik. Khususnya Fatayat terbuka terhadap semua lembaga karena kader Fatayat warnanya macam-macam tidak bisa diarahkan dan harus diberi kebebasan.

## **Kesimpulan**

Organisasi Perempuan menjadi organisasi yang efektif kepada kaum perempuan dalam melakukan peran sosialisasi politik. Kaum perempuan di Kudus sebagian besar masuk ke dalam dua organisasi besar perempuan di Kudus, yaitu Fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah. Kedua organisasi tersebut sebagai agen sosialisasi yang berasal dari komunitas yang paling dekat dengan kaum perempuan. Bentuk sosialisasi politik yang dilakukan melalui pendidikan politik tentang kepemimpinan, kesetaraan gender, partisipasi perempuan, ataupun wawasan kebangsaan. Kedua organisasi tersebut melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan sosialisasi politik seperti dengan Bawslu, Kesbangpol bahkan terbuka bagi partai politik seperti PKB, PAN, dan Golkar. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Fatayat dan Nasyiatul Aisyiyah belum bisa maksimal. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi perempuan dalam politik yang masih terbatas dikarenakan masih banyak stigma negative perempuan yang merasa dunia politik tabu bagi perempuan serta belum adanya keterwakilan perempuan sebagai seorang pemimpin di Kudus.. Padahal realita di lapangan jumlah perempuan di Kudus lebih banyak dari kaum laki-laki.

## Referensi

- Dagupta, S. (2011). *Political Sociology*. Pearson Education, Inc.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Prenada Media Grup.
- fatayatnu.or.id. (n.d.). *Sejarah Fatayat*. <https://fatayatnu.or.id/sejarah/>
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55–72.
- nasyiah.or.id. (n.d.). *Visi Misi NA*. <http://nasyiah.or.id/Welcome/profil/1>
- Octafitria, Y. (2016). Media Sosial sebagai Agen Sosialisasi Politik pada Kaum Muda Indonesian. *Journal of Sociology and Education Policy*, 1(1).
- Rush, M., & Althoff, P. (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Press.
- Sulaeman, Z. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Kompas Media Nusantara.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.
- Susanto. (1992). *Pengantar Sosialisasi*. Rajawali Press.
- Sutaryo. (2005). *Dasar-dasar sosialisasi*. Rajawali Press.
- Syarbaini, S., & dkk. (2014). *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia.
- Wibowo, M. T., & Hasan, E. (2017). Sosialisasi Politik bagi Pemilih Pemula di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, 1(1).
- Yuliani, D. (2016). Peran organisasi wanita dalam partisipasi politik perempuan. *Jurnal Moderat*, 2(2).